

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dinas Pendidikan Kab. Tapsel memperoleh DID pada tahun 2019 dan tahun 2021. Kerangka *logic model* penggunaan DID dimulai dari *input*, proses, *output*, *outcome*. *Input* pada program di dua tahun tersebut masih sama yaitu DID, sumber daya manusia (SDM), kebijakan yang berlaku, dan proposal pengajuan pendanaan program. Proses untuk mengubah input tersebut menjadi output pada tahun 2019 adalah pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas di beberapa sekolah dasar. Sedangkan proses pada tahun 2021 adalah pembangunan RKB SD, rehabilitasi ruang kelas SD dan PAUD, pengadaan mebel SD dan PAUD, dan pengadaan alat bermain edukatif PAUD. *Outcome* penggunaan DID ini tergantung jenis *output*-nya. *Output* pembangunan RKB memiliki *outcome* peningkatan kapasitas SD untuk menampung rombongan belajar, peningkatan APM/APK di Kabupaten Tapsel, dan peningkatan efektifitas dan kenyamanan dalam KBM sekaligus memaksimalkan pelayanan publik Dinas Pendidikan. *Output* rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan mebel memiliki *outcome* terwujudnya kenyamanan dan efektifitas dalam KBM sekaligus memaksimalkan pelayanan publik Dinas Pendidikan. *Output* alat bermain edukatif berdampak terhadap terwujudnya fasilitas PAUD yang responsif terhadap gender. Ditinjau dari kerangka *logic model* tersebut, penggunaan DID sudah efektif karena *output* telah mencapai *outcome* yang diharapkan. Alokasi DID untuk PAUD dan SD juga sudah melebihi 10% dari total DID Kab. Tapsel hal tersebut telah

sesuai dengan yang disebutkan Kementerian Keuangan (2021) bahwa Penggunaan DID paling rendah 10% untuk bidang pendidikan.

Kendala penggunaan DID dialami oleh PAUD dan SD. Kendala PAUD dalam penggunaan DID adalah alokasi DID yang sedikit, PAUD yang tidak proaktif mengajukan proposal dan DID yang tidak bisa dialokasikan untuk PAUD yang tidak memiliki lahan. Sedangkan Kendala SD dalam penggunaan DID adalah alokasi DID yang semakin besar untuk menutupi menu DAK kegiatan SD yang sudah dihapus, masyarakat tidak bersedia menyediakan lahan, tidak ada biaya pematangan lahan serta jarak tempuh yang banyak menghabiskan biaya. Kendala pada penggunaan dan pencairan DID sejauh ini belum ada.

4.2 Saran

DID sebaiknya diprioritaskan pada sekolah yang berada di bagian pedalaman Kab. Tapsel. Ada beberapa sekolah di pedalaman kecamatan yang kesulitan mendapatkan jaringan internet. Pembangunan infrastruktur jaringan internet pada SD melalui DID adalah bentuk digitalisasi pelayanan pendidikan sebagai prioritas penggunaan DID sesuai dengan PMK Nomor 167/PMK.07/2020.

Pemerintah daerah perlu menyusun kriteria PAUD yang berhak menerima DID dari pada menunggu inisiatif PAUD untuk mengajukan proposal. Kriteria PAUD yang berhak menerima DID dapat dinilai dari aspek kebutuhan dan aspek prestasi.

Sebaiknya dokumen yang bisa diakses masyarakat harus lebih ditatausahakan dengan baik seperti DPA (dokumen pelaksanaan anggaran). Penulis

kesulitan melakukan analisis dokumen sebab DPA 2019 tidak diketahui keberadaanya.

4.3 Saran penelitian berikutnya

Penelitian berikutnya disarankan menggunakan Dinas Kesehatan sebagai objek penelitian. Dinas Kesehatan lebih banyak mendapatkan alokasi DID jika dibandingkan dengan Dinas Pendidikan. Kedua dinas ini merupakan prioritas penggunaan DID sehingga efektifitas penggunaan DID oleh Dinas Kesehatan juga perlu ditinjau.

Penelitian berikutnya juga disarankan untuk meninjau penggunaan DID, DAK, dan Dana BOS di Dinas Pendidikan. Sebab berdasarkan wawancara, tampaknya ketiga sumber pendanaan ini memiliki sifat yang berbeda tergantung programnya. Oleh sebab itu, perlu diketahui alasan apa yang membuat Dinas Pendidikan membedakan jenis pendanaan tersebut padahal belum ada peraturan yang mengatur.